

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011, Bab XI. ps. 96.

_____, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 13 Tahun 2022, ps. 96.

_____, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang*, Nomor 06/PMK/2005, ps. 4 (3).

_____, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, hlm: 393

B. Buku

Al Atok, A. Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2015.

Ariona, Yance. *Negara Hukum Bernurani : Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Perkumpulan HuMa, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, Jakarta: Konpress, 2020.

- Christiawan, Rio. *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Fatkhurohman, et al. "*Legislative Drafting*", Malang : Setara Pers, 2016.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Handoyo, Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2004.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Immanuel Victor, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Suluh Media, 2017.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Ismatullah Deddy, dan Asep A. Sahid, *Ilmu Negara*, Bandung : Pustaka Setia, 2017.
- Lubis, M. Solly. *Ilmu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 2014.
- Muluk, Khairul. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintah Daerah*, Malang : LPD FIA UB dan Bayu Media, 2007.
- Qamar Nurul, et al. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Makassar : SIGn, 2018.
- Rachman. Irfan Nur, et al. *Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Depok : Rajawali Pers, 2021.
- Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2018
- Santoso, Mas Akhmad, *Good Government dan Hukum Lingkungan*, Jakarta : ICEL, 2001.

Sirajuddin et al. ., *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Malang : Corruption Watch dan YAPPIKA, 2006.

Sirajuddin et al., *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang : Setara Pers, 2016.

Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta : Alfabeta, 2014.

Wiranggani, Panjalu. *Demokrasi*, Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2017.

C. Lain-lain

Admin, "Teori Negara Hukum", tersedia di: <https://info.hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>. Diakses tanggal: 6 November 2022.

Ahlan, Fitria. "Membangun dan Memastikan Partisipasi Bermakna Dalam Proses Legislasi" tersedia di: https://www.youtube.com/watch?v=3cRa_cnpEJI&t=4605s. Diakses tanggal 12 April 2023.

Ardianto, Yoni. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif", tersedia di: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>. Diakses tanggal 7 November 2022.

Astuti Dwiningrum, Siti Irene. "Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik". tersedia di: <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808673/pene>

litian/desentralisasi-partisipasi-masyarakat-dalam-pondidikan.pdf. Diakses tanggal 1 November 2022.

Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, (Vol. 21 No.3 Tahun 2016) : 220.

Frans, Michael. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Universitas Muhammadiyah (Metro)*, Juli 2018, hlm : 90.

Hadi Priatna, I Ktut. Kepala Biro Hukum Sekretariat Kementrian Perekonomian, *Wawancara. Zoom Meeting*, 21 Februari 2023.

Hendartyo, Muhammad. "Kejar Tayang RUU Cipta Kerja, Pukulan Keras bagi Buruh dan Sambutan Mogok Kerja", tersedia di: <https://focus.tempo.co/read/1392140/kejar-tayang-ruu-cipta-kerja-pukulan-keras-bagi-buruh-dan-sambutan-mogok-kerja>. Diakses pada 30 Oktober 2022.

Hukum Nasional, Badan Pembinaan. *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, (Jakarta, 2008), hlm, 6. tersedia di: https://www.bphn.go.id/data/documents/tiga_de_kade_prolegnas.pdf

Ivanny, Jessica Cornelia. "Mahasiswa Bersuara: Mendorong Partisipasi Bermakna Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang", tersedia di:

<https://bandungbergerak.id/article/detail/15169/mahasiswa-bersuara-mendorong-partisipasi-bermakna-masyarakat-dalam-pembentukan-undang-undang>. Diakses pada 12 April 2023.

Juanitha Callychya RT et al. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Vol 1 No. 3 Tahun 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Masyarakat", tersedia di:
<https://kbbi.web.id/masyarakat>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Partisipasi", tersedia di:
<https://kbbi.web.id/partisipasi>.

Kartodihardjo, Hariadi. "Partisipasi Publik Memperbaiki UU Cipta Kerja", tersedia di :
<http://www.forestdigest.com/detail/1476/partisipasi-publik-uu-cipta-kerja>. Diakses pada 12 Oktober 2022.

M, Ilham. "Penguatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", tersedia di:
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18727>. Diakses pada 1 Januari 2023.

Mainake, Yosephus. "Uji Formil UU KPK Oleh Mahkamah Konstitusi", *Isu Sepekan Bidang Hukum DPR RI*, 6 Mei 2021.

Mihradi, Raden Muhammad. "Putusan MK dan Erosi Partisipasi Publik Dalam Legislasi", tersedia di :
<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/28/16451681/.putusan-mk-dan-erosi-partisipasi->

publik-dalam-legislasi. Diakses tanggal 12 Oktober 2022.

Muchtar, Zainal Arifin. "Membangun dan Memastikan Partisipasi Bermakna Dalam Proses Legislasi" tersedia di: https://www.youtube.com/watch?v=3cRa_cnpEJI&t=4605s. Diakses tanggal 12 April 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Pers, 2020. tersedia di: <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Nugroho, Sigit. , "Partisipasi Publik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik Dalam Perundang-Undangan", tersedia di: https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_sigit_nugroho.pdf. Diakses pada 3 Januari 2023.

Pramono, Nindyo. "Perppu Cipta Kerja dan Kepastian Hukum Iklim Investasi". *Kompas*. 11 Januari 2023.

PSHK, "DPR Gagal Memahami Partisipasi Publik Bermakna dalam Penyusunan RKUHP", tersedia di : <https://www.pshk.or.id/publikasi/dpr-gagal-memahami-partisipasi-publik-bermakna-dalam-penyusunan-rkuhp/>. Diakses pada 12 April 2023

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), "DPR Gagal Memahami Partisipasi Publik Bermakna dalam Penyusunan RKUHP", tersedia di: <https://pshk.or.id/publikasi/dpr-gagal-memahami-partisipasi-publik-bermakna-dalam->

penyusunan-lirkuhp/. Diakses pada 3 Januari 2023.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), “Proses Legislasi dan Partisipasi Publik”, tersedia di : <https://pshk.or.id/media-rr/proses-legislasi-dan-partisipasi-publik/>.

Putri, Zhaudiva Azzahra dan Rahayu Subekti. “Teori Legislasi dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, diterbitkan oleh Universitas Sebelas Maret. Volume 1 No, 1 Tahun 2022.

Ratnaningsih, Erna. “Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, tersedia di: [https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamahkonstitusi/#:~:text=Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20merupakan,oleh%20siapapun%20\(erga%20omnes\)](https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamahkonstitusi/#:~:text=Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20merupakan,oleh%20siapapun%20(erga%20omnes).). Diakses tanggal 6 November 2022.

Saragih, Tomy M. “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan”, Vol. 17 No. 3 Tahun 2011.

Sari, Haryanti Puspas. “Kekhawatiran atas Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja”, tersedia di: <https://pshk.or.id/rr/kekhawatiran-atas-minimnya-partisipasi-publik-dalam-pembahasan-ruu-cipta-kerja/>. Diakses pada 1 Januari 2023.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009. tersedia di: <https://www.pdfdrive.com/prof-dr-sugiyono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-intro-e56379944.html>
- Sulistiani, Rosalia Ayu. “5 Pengertian Publik dan Stakeholder, perbedaan Publik dan Stakholder”, tersedia di: <http://blog.ub.ac.id/rosaa/2015/04/09/5-pengertian-publik-dan-stakeholder-perbedaan-publik-dan-stakeholder-2/>. Diakses tanggal 1 November 2022.
- Syurdi, Endeh Suhartini. “Kontroversi Perppu Tentang Cipta Kerja”. *Radat Bogor*. 27 Januari 2023.
- Tresna, Nano. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, tersedia di: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>. Diakses tanggal 12 Oktober 2022.
- Wardah, Fathiyah. “Minim Partisipasi Publik, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RKUHP Tahun Ini”, tersedia di : <https://www.voaindonesia.com/a/minim-partisipasi-publik-koalisi-masyarakat-sipil-tolak-pengesahan-rkuhp-tahun-ini/6810727.html>. Diakses pada 12 April 2023.